

LAPORAN KINERJA 2025

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Setditjen PDSPKP) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kepada para pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat capaian kinerja, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah direalisasikan oleh Setditjen PDSPKP dalam menjalankan fungsi pelayanan teknis dan administratif. Melalui laporan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian peningkatan kinerja Setditjen PDSPKP.

Pada Triwulan II Tahun 2025, kinerja Setditjen PDSPKP ditunjukkan melalui pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,21% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Tim Kerja Lingkup Setditjen PDSPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang informatif kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan mandat serta capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi landasan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Seluruh capaian ini dibangun atas dasar internalisasi nilai-nilai organisasi #KITAPDS, yakni Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Jakarta, 15 Juli 2025
Sekretaris Ditjen PDSPKP

Machmud

IKHTISAR EKSKLUSIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 Sekretariat Ditjen PDSPKP memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 15 (lima belas) bersifat tahunan.

Sebanyak 20 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerja adalah sebesar 111,21% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”.

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tiga (3) indikator kinerja yang bersifat triwulanan dan seluruhnya telah diukur hingga Triwulan II. Ketiga indikator tersebut menunjukkan capaian optimal, yakni: (1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP, (3) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP:
3. 15 (lima belas) indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (2) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (3) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup

Direktorat Jenderal PDSPKP, (7) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (9) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (10) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 Serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (11) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (13) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (14) Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PDSPKP, (15) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

4. Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp 89.592.966.000,- (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat Efisiensi sebesar Rp 19.057.041.000,- (Sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) Pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp 70.535.925.000,- (Tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 35.538.619.000,- (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) setara dengan 30,87% terhadap pagu awal dan sebesar 39,05% dari pagu anggaran efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Sistematika Penyajian LKj.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	12
1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	12
2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	15
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	16
4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	21
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	23
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	29
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	34

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	38
9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks).....	43
10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	45
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	48
12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	51
13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	53
14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	55
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	58
16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	60
17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	62
18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen).....	64
19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	69
20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	71
C. Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Permasalahan dan Rekomendasi	75
C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	75
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	7
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025	10
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	13
Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025	14
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	15
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	16
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	21
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	23
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	30
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	34
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	39
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP	43
Tabel 13. Ikhtisar pencasspaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen).....	46
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	49
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	51

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	53
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	56
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	59
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	60
Tabel 20. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	63
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	65
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	69
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025	5
Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025	5
Gambar 3. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025	9
Gambar 4. Rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Tanggal 24 Juni 2025.....	14
Gambar 5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Modul Bantuan Pemerintah	18
Gambar 6. Rapat Update data pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024	19
Gambar 7. Update DATA Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024	19
Gambar 8. Rapat Pemutakhiran Data Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP.....	20
Gambar 9. Evaluasi capaian triwulan I Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen PDSPKP	22
Gambar 10. Kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK).....	25
Gambar 11. Kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Level I dan Laporan Kinerja Level 2 PDSPKP.....	26
Gambar 12. Review Laporan Kinerja (LKj) level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I tahun 2025	27
Gambar 13. Pembahasan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan II Tahun	28
Gambar 14. Pembahasan Laporan Kinerja Level II PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025.....	29
Gambar 15. Capaian Sementara Nilai IKPA Ditjen PDSPKP.....	31
Gambar 16. Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output.....	32
Gambar 17. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode Mei Tahun 2025.....	33
Gambar 18. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.....	36
Gambar 19. Rapat Pembahasan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025	37

Gambar 20. Rapat Rancangan Revisi DJA yang bersumber dari Sentra Kuliner TA 2025 dan Usulan Revisi Kewenangan KPA	38
Gambar 21. Training of Trainer Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara .	45
Gambar 22. Sosialisasi Permen KP No. 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja, 10 Juni 2025	45
Gambar 23. Sosialisasi dan Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pengawasan Kearsipan.....	49
Gambar 24. Finalisasi Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2025.....	50
Gambar 25. Rapat Persiapan Aksi Perubahan Digitalisasi Arsip.....	50
Gambar 26. Penataan Arsip Inaktif	50
Gambar 27. Rapat Updating RUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP	53
Gambar 28. Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Pengolahan	55
Gambar 29. Penyusunan Perubahan Tugas dan Fungsi BBP3KP	55
Gambar 30. Aspek dan bobot penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2025	56
Gambar 31. Rapat Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 Tanggal 19 Mei 2025.....	57
Gambar 32. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024	60
Gambar 33. Pemeliharaan BMN	61
Gambar 34. Pengadaan Barang Persediaan.....	62
Gambar 35. Rapat Pembahasan rencana implementasi SRG dalam rangka antisipasi dampak pemberlakuan tarif Impor USA.....	67
Gambar 36. Focus Group Discussion (FGD) realisasi penyaluran kredit program tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025	68
Gambar 37. Penandatngan Perjanjian Kerja Sama antara Asprindo dan GQSP (UNIDO).....	68
Gambar 38. Penandatngan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan AP2HI pada kick off STELINA.....	68
Gambar 39. Rapat rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. BNI (Persero) Tbk.....	68
Gambar 40. Penandatngan BAST dan Perjanjian Hibah Kendaraan Berpendingin Dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada Pemda Kabupaten Kebumen	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025	76
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP tidak hanya berfungsi sebagai penopang administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Salah satunya mendukung kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan market driven di mana kebutuhan dan preferensi pasar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, sehingga lebih mudah diterima dan diminati oleh konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, produk kelautan dan perikanan dituntut memiliki karakteristik unggul, yakni berkualitas tinggi (*high quality*), aman untuk dikonsumsi (*safe*), dapat ditelusuri asal-usulnya (*traceable*), memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value content*), serta kompetitif di pasar (*competitive*). Pelaksanaan kebijakan ini dirancang secara berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, guna memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan itu, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat

dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja triwulan II tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak pemberi mandat. Melalui laporan ini, dirumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada periode selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

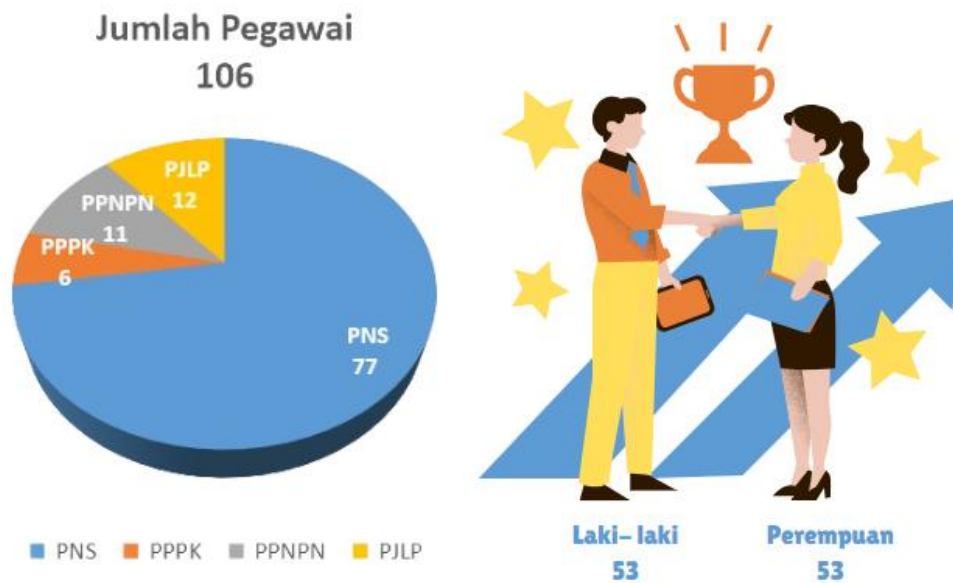
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 1133/SJ.3/OT.210/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
3. Tim Kerja Hukum;
4. Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
5. Tim Kerja Data dan Layanan Publik;
6. Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal;
7. Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Tim Kerja Kearsipan dan layanan Perkantoran.

D. Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025

E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja berisi tentang pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

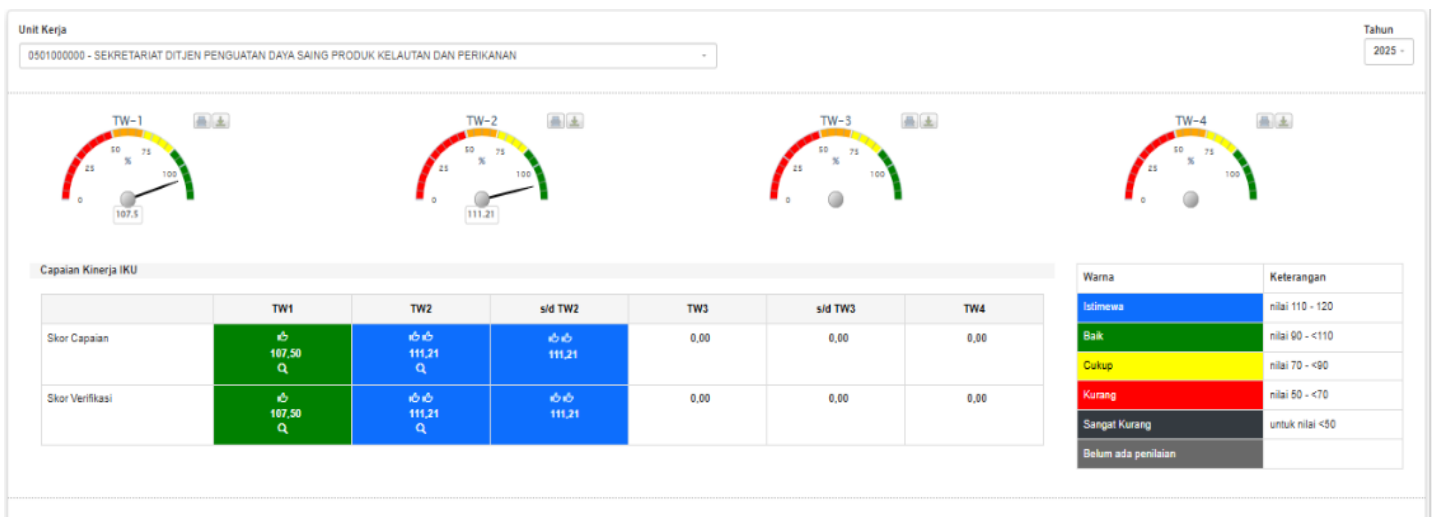
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76
		13.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16.	Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18.	Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 15 (lima belas) bersifat tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 111,21%(Istimewa). NKO tersebut merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi TW II 2025	% Terhadap Target TW II	% Terhadap Target 2025
				Tahun 2025	TW II 2025			
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85	85	95,90	112,82	112,82
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5	-	-	-	-
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81	-	-	-	-
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76	-	-	-	-
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92	85	95,16	111,95	103,43
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5	-	-	-	-
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5	-	-	-	-
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87	82	83,12	101,37	95,54

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW II 2025	% Terhadap Target TW II	% Terhadap Target 2025
			Tahun 2025	TW II 2025			
		10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	-	-	-	-
		11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80	-	-	-	-
		12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76	-	-	-	-
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65	-	-	-	-
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77	-	-	-	-
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90	-	-	-	-
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12	6	6	100	50
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100	-	-	-	-
		18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW II 2025	% Terhadap Target TW II	% Terhadap Target 2025
		Tahun 2025	TW II 2025			
	19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	0	120	120
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

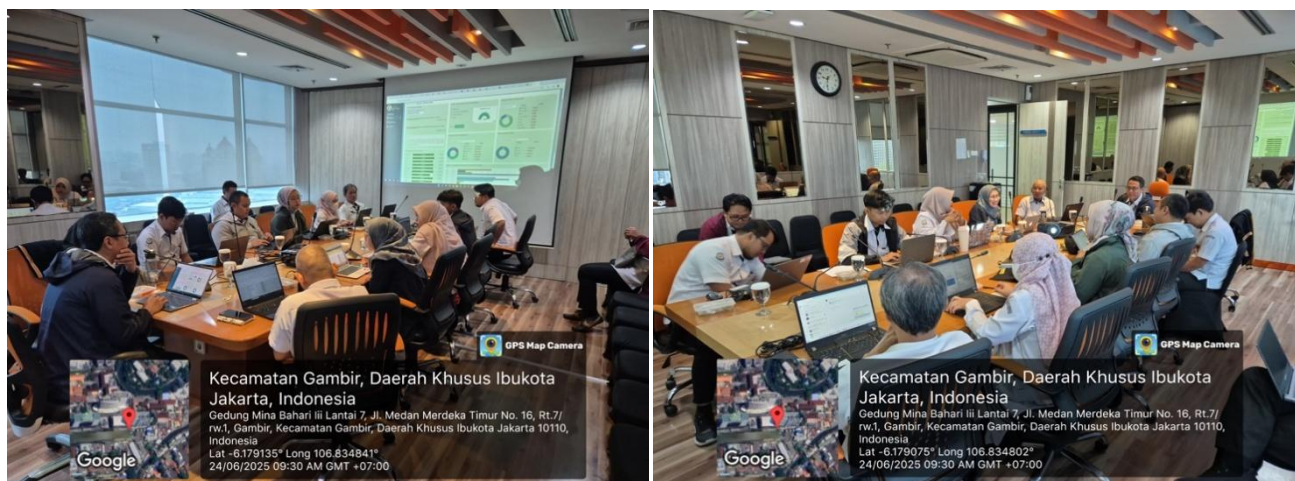
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada LHP-nya pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II sampai dengan 30 Juni Tahun 2025 (Triwulan II Tahun 2025).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	85	85	80	85	95,9	100	86,25	95,9	112,85	112,85	-4,1	11,19

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 95,90%. Capaian ini setara dengan 112,85% terhadap target Triwulan II Tahun 2025, dan juga 112,85% terhadap target Tahun 2025 yang masing-masing ditetapkan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (TW I 2025) sebesar 100%, maka capaian Triwulan II Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan sebesar 4,1%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (TW II 2024) sebesar 86,25%, maka terdapat peningkatan capaian sebesar 11,19%.

Pada triwulan II Tahun 2025 Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 24 Juni 2025. Rapat dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP terkait. Pada kegiatan ini dibahas terkait laporan hasil pemeriksaan Itjen beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.



Gambar 4. Rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Tanggal 24 Juni 2025

Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	% Sisa Rekom
1	Direktorat Logistik	21	21	100%	0	0%
2	Direktorat Pengolahan	19	19	100%	0	0%
3	Direktorat Pemberdayaan Usaha	5	5	100%	0	0%
4	Direktorat Pemasaran	9	9	100%	0	0%
5	Setditjen PDSPKP	66	61	92,42%	5	7,58%
6	BBP3KP	2	2	100%	0	0%
TOTAL		122	117	95,90%	5	4,10%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 95,90% (tuntas 117 dari 122 rekomendasi).

2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2025.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan <0,5. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Sifat polarisasi indikator kinerja ini adalah minimize atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;

- b. Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Mei Tahun 2025 Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2025. *Output* kegiatan ini yaitu rekonsiliasi transaksi *to do list* dan pendetilan transaksi pada aplikasi sakti dan monsakti;
- c. Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 serta penyusunan tanggapan atas konsep temuan BPK-RI

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 467.570.000,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 523.081.000,- atau setara dengan 89%.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	81	-	-			-	-	-	-

Indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP ditargetkan 81%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan II belum dapat diketahui tingkat capaiannya dan Pada tahun 2024 dengan target 80%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Ditjen PDSPKP telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah tahun 2024 serta kompilasi laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal:

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Modul Bantuan Pemerintah dalam Portal Data KKP dilaksanakan tanggal 16 April 2025.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi diselenggarakan sebagai wujud komitmen KKP terhadap tata kelola bantuan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan Bimtek telah membantu mempersiapkan operator dan stakeholder untuk mengoptimalkan penggunaan sistem berbasis digital. Langkah selanjutnya adalah:

- a) Pemutakhiran data dan penggunaan aktif aplikasi bantuan.
- b) Koordinasi lanjutan antara unit pelaksana bantuan dan Pusdatin.
- c) Monitoring berkala efektivitas sistem dan kinerja penyaluran bantuan.
- d) Evaluasi lanjutan terhadap laporan kinerja berdasarkan output dari aplikasi.



Gambar 5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Modul Bantuan Pemerintah

- b. Rapat Update data pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 8 Mei 2025.

Sebagai tindak lanjut dari program penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2024, serta untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) .

Dalam rangka mendukung ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program bantuan pemerintah (BP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), diperlukan sistem pendataan dan pemutakhiran data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan aplikasi Bantuan Pemerintah KKP menjadi salah satu langkah strategis dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data bantuan pemerintah, baik dari sisi program maupun data penerima. Untuk itu, diperlukan komitmen dan koordinasi antarunit kerja di lingkup Ditjen PDSPKP guna memastikan seluruh usulan program BP tahun 2025 telah diinput dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan.



Gambar 6. Rapat Update data pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

- c. Update DATA Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 pada Dashboard Bantuan Pemerintah KKP dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025.

Kegiatan pemutakhiran dan verifikasi data bantuan pemerintah di lingkungan Ditjen PDSPKP, Proses ini dilakukan berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP, melalui tautan resmi di: <https://bit.ly/BANTUANPEMERINTAHPDS>

Tim pengelola data dari masing-masing Unit Kerja Eselon II bersama Tim Data Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan pembaruan data bantuan yang telah disalurkan, termasuk status keberlanjutan bantuan tersebut, apakah masih beroperasi atau sudah tidak berjalan. Untuk bantuan yang tidak lagi operasional, diperlukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut guna mengetahui akar permasalahan serta potensi reaktivasi.



Gambar 7. Update DATA Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024

- d. Pemutakhiran Data Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP dilaksanakan tanggal 27 Mei 2025.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah disalurkan oleh direktorat lingkup Ditjen

PDSPKP selama periode tahun 2013-2024. Beberapa hal yang diperhatikan terkait hal tersebut:

- 1) Menyelaraskan data bantuan pemerintah yang dimiliki Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dengan data yang telah diinput oleh Sekretariat PDSPKP sesuai format pada link <https://bit.ly/BANTUANPEMERINTAHPDS>.
- 2) Mengupdate data operasional masing-masing bantuan pemerintah yang telah disalurkan, sehingga dapat terlihat daerah-daerah yang serius mengelola bantuan pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan pada pemberian bantuan pemerintah di tahun berikutnya.
- 3) Melengkapi data berupa No BPJS, NIK dan KUSUKA pada penerima bantuan pemerintah minimal pada penerima pada tahun 2024.
- 4) Tim bantuan BP lingkup PDSPKP diharapkan dapat menyesuaikan data yang telah diupdate pada link untuk digunakan pada pengisian data bantuan pemerintah KKP pada aplikasi bantuan pemerintah.
- 5) Pengisian data BP pada aplikasi bantuan pemerintah saat ini oleh Tim Data Ditjen PDSPKP bila dibandingkan dengan Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya masih terbilang belum optimal dikarenakan masih ada beberapa data yang harus dilengkapi seperti data BAST penerima serta nomor KUSUKA penerima.



Gambar 8. Rapat Pemutakhiran Data Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP

4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

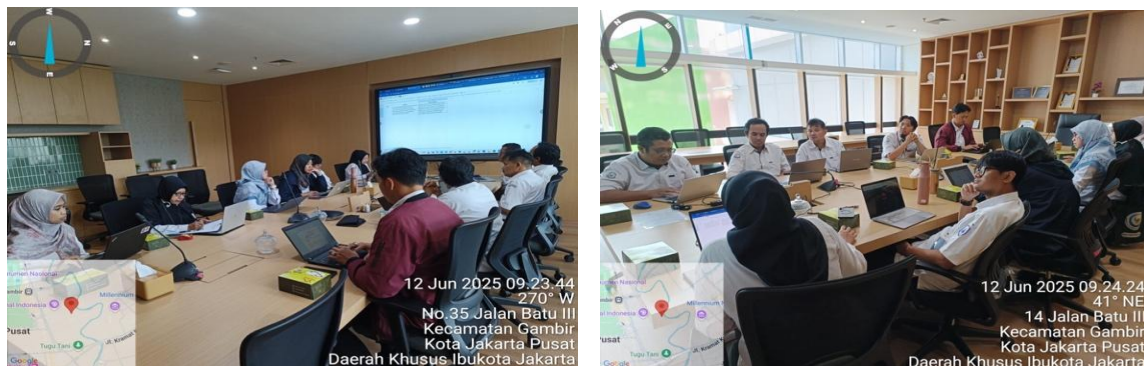
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 76. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan April, Mei dan Juni 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan

- kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- c. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP melalui penetapan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 45 Tahun 2025;
 - d. Pembentukan Tim Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 47 Tahun 2025;
 - e. Pelaksanaan evaluasi capaian triwulan I Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 4 – 13 Juni 2025;
 - f. Mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP bersama Kemen PANRB pada tanggal 21 Mei 2025;
 - g. Mengikuti Pembahasan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025- 2026 pada Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan pada tanggal 15 Mei 2025;
 - h. Mengikuti Sosialisasi Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan 4 Juni 2025;



Gambar 9. Evaluasi capaian triwulan I Reformasi Birokrasi Tematik lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 27.977.560,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 30.200.000,- atau setara dengan 93%.

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PDSPKP.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		86	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 86. Indikator Nilai Penilaian Mandiri AKIP bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan I tahun anggaran 2025 yaitu Penginputan dan Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) dilaksanakan pada tanggal 17 april 2025

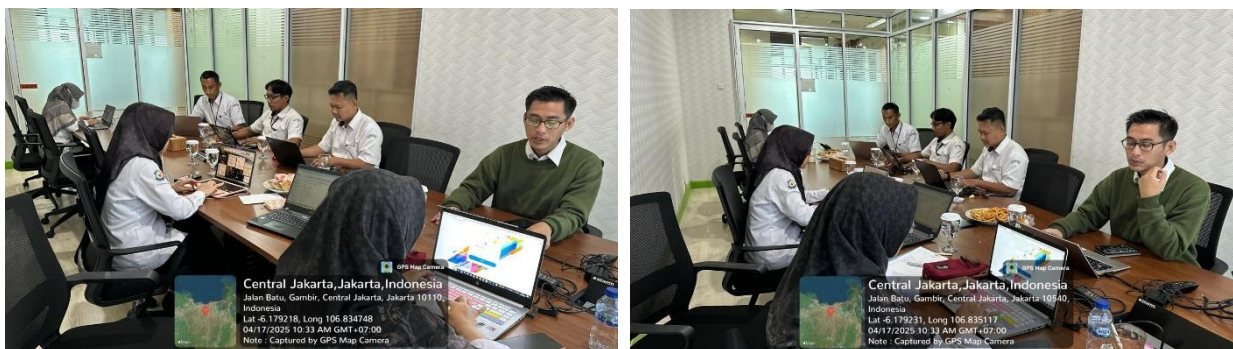
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengisian capaian kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi SAPK KKP sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

1. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP Lantai 14 GMB III KKP, pada tanggal 17 April 2025
2. Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Program Sekretariat Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh Perwakilan Biro Perencanaan KKP, dan Perwakilan Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP
3. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan penginputan capaian kinerja Unit Kerja Level 1 dan Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025

Ditjen PDSPKP memiliki 5 indikator kinerja pada tahun 2025, dan terdapat dua indikator kinerja yang akan diukur pada tahun 2025 yaitu nilai ekspor rumput laut serta nilai ekspor produk perikanan lainnya. Berdasarkan hasil penginputan capaian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut periode Triwulan I tahun 2025 mencapai USD 0,05 miliar (angka sementara sampai dengan Februari). Capaian tersebut setara dengan 34,54 % terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar USD 0,14 miliar, dan 8,18% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar USD 0,57 miliar.
2. Capaian Nilai Nilai ekspor produk perikanan lainnya Triwulan I tahun 2025 mencapai USD 0,94 miliar (angka sementara sampai dengan Februari). Capaian tersebut setara dengan 69,89 % terhadap target triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar USD 1,35 miliar, dan 16,62% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar USD 5,676 miliar.

Indikator kinerja Ditjen PDSPKP lainnya yang tidak diukur pada periode triwulan I tahun 2025 yaitu Nilai Pemasaran Produk Perikanan Lainnya yang akan diukur pada akhir tahun 2025; Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas yang akan diukur pada semester I dan semester II; dan Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP yang akan diukur pada akhir tahun 2025.



Gambar 10. Kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)

- b. Pelaporan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP periode Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 21 april 2025.

Kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Level I dan Laporan Kinerja Level 2 PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024 di Rr. Setditjen PDSPKP, GMB III lantai 14. Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan Setjen KKP, perwakilan masing-masing eselon II. Agenda rapat yang dilakukan: (a) Pembahasan Laporan Kinerja Level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025 ; (b). Pembahasan Laporan Kinerja Level II Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025; Beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat, berdasarkan Permen KP Nomor 23 Tahun 2023 tentang pengelolaan Kinerja.



Gambar 11. Kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Level I dan Laporan Kinerja Level 2 PDSPKP

- c. Rapat Pembahasan Review Laporan Kinerja (LKj) level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I tahun 2025 dilaksanakan pada 20 Mei 2025.

Reviu dilaksanakan sebagai telaah terbatas dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa LKj yang disusun telah disajikan sesuai format dalam Lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja yang disajikan. Ruang lingkup reviu meliputi pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja serta telaahan atas aktivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan reviu yaitu, membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi keinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan LKj yang berkualitas.

Secara umum, hal-hal yang belum sesuai dan ditemukan pada LKj adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapat ketidaksesuaian format LKj dengan Permen KP 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP;
- b) Masih terdapat ketidaksesuaian informasi kinerja antara dokumen perencanaan seperti manual iku, rencana aksi, dan perjanjian kinerja dengan dokumen pelaporan baik di dalam LKj maupun aplikasi pelaporan Kinerjaaku KKP;
- c) Masih ada indikator kinerja yang belum dilengkapi kegiatan pendukung capaian dan realisasi anggaran pendukung indikator kinerja;

- d) Masih terdapat indikator kinerja yang belum dilengkapi analisis yang memadai terkait ketercapaian atau ketidaktercapaian indikator kinerja.



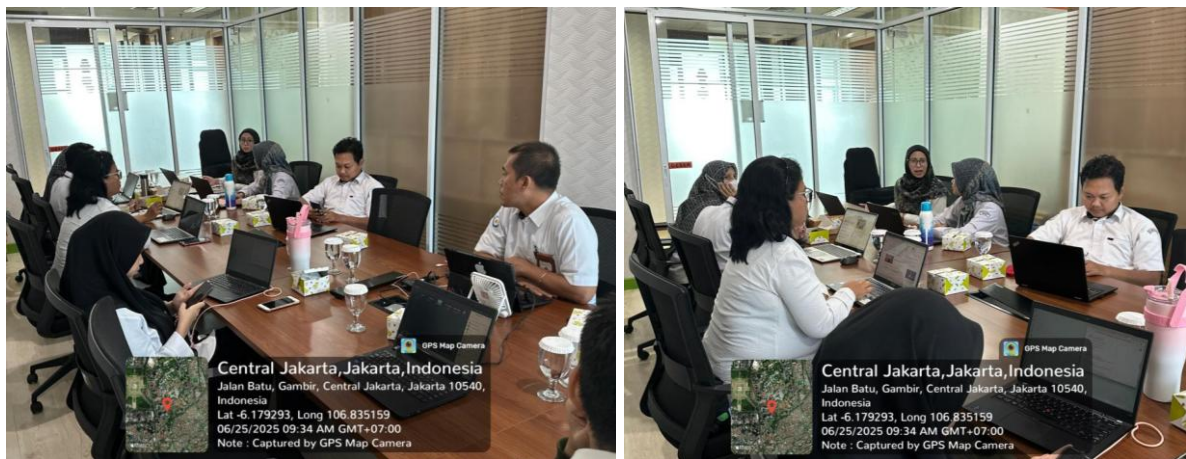
Gambar 12. Review Laporan Kinerja (LKj) level I Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I tahun 2025

- d. Pembahasan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan pada Rabu tanggal 25 Juni 2025.

Kegiatan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 di Rr. Setditjen PDSPKP, GMB III lantai 14. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menyusun dan mengevaluasi Laporan Kinerja Level I PDSPKP untuk periode Triwulan II Tahun 2025. Tujuan utamanya adalah memastikan laporan yang disusun mampu merefleksikan capaian kinerja unit kerja secara akurat, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan strategis kementerian. Rapat dipimpin oleh Penanggung Jawab Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan Setjen KKP, perwakilan masing-masing eselon II. Agenda rapat berfokus pada:

- Pembahasan substansi Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025;
- Penelaahan kesesuaian indikator kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun berjalan;
- Penyesuaian laporan terhadap ketentuan yang diatur dalam Permen KP No. 23 Tahun 2023.
- Dalam rapat ini disampaikan bahwa laporan kinerja harus mencakup berbagai elemen penting, antara lain:

- Narasi yang menggambarkan Indikator Kinerja (IKU) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- Data target dan realisasi IKU untuk berbagai periode pembandingan, termasuk triwulan berjalan, triwulan sebelumnya di tahun yang sama, dan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.
- Persentase capaian terhadap target berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan.
- Ringkasan realisasi kinerja sampai dengan periode pelaporan saat ini.



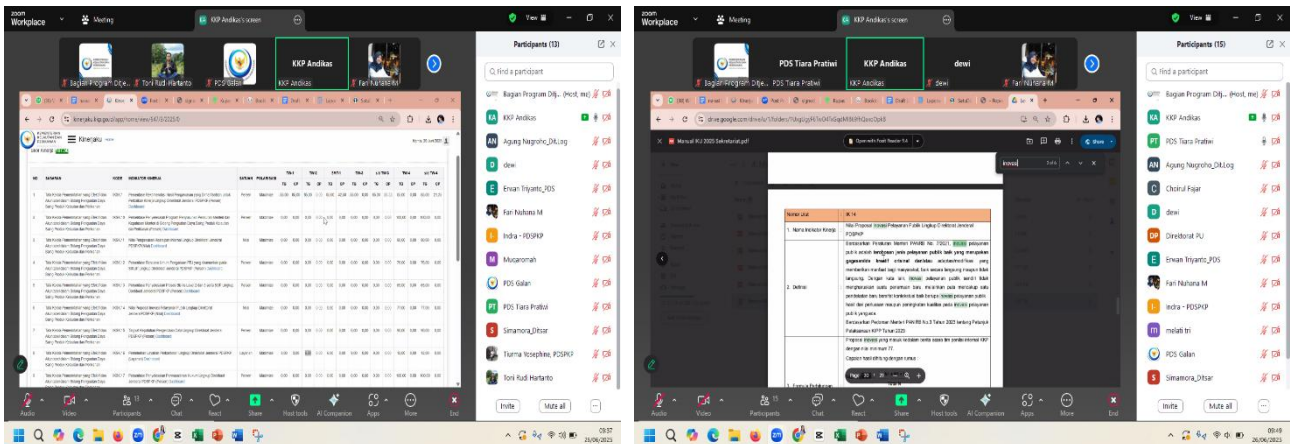
Gambar 13. Pembahasan Laporan Kinerja Level I PDSPKP Periode Triwulan II Tahun

- e. Pembahasan Laporan Kinerja Level II PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025, dilaksanakan pada Kamis tanggal 26 Juni 2025.

Rapat penyusunan Laporan Kinerja Level 2 PDSPKP periode Triwulan II Tahun 2025 diselenggarakan guna menindaklanjuti proses berjenjang pelaporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB No. 53 Tahun 2014. Laporan Level 2 ini merupakan turunan dari Laporan Level 1 dan menggambarkan kontribusi satuan kerja terhadap capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal secara keseluruhan.

Rapat dihadiri oleh perwakilan masing-masing unit kerja teknis di bawah koordinasi Ditjen PDSPKP, termasuk pejabat dan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pelaporan kinerja satker. Diskusi dipandu oleh Koordinator Pelaporan Kinerja, dan seluruh

peserta memberikan masukan teknis terhadap format, narasi, dan dukungan data yang akan digunakan dalam laporan dimaksud.



Gambar 14. Pembahasan Laporan Kinerja Level II PDSPKP Periode Triwulan II Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 30.952.850,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 149.853.000,- atau setara dengan 14%.

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	85	-	83	92	95,16	-	93,04	95,16	111,95	103,43		2,28

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 95,16. Capaian ini setara dengan 111,95% terhadap target Triwulan II Tahun 2025 sebesar 85, dan 103,43% terhadap target Tahun 2025 sebesar 92. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan II Tahun 2024) sebesar 93,04, terdapat peningkatan capaian sebesar 2,28%.

Dalam rangka optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Jenderal PDSPKP pada perioder Triwulan II tahun 2025, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen PDSPKP antara lain:

- 1) Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode April 2025 dengan seluruh Satker Tugas Pembantuan (TP) lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 7 Mei 2025, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 34 Satker TP. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Aplikasi OMSPAN per tanggal 7 Mei 2025 data capaian IKPA Ditjen PDSPKP periode April 2025 sebesar 75,34. Data tersebut masih sebagai data capaian sementara karena masih untuk progres capaian output masih dalam proses pengisian dan akan di *close* pada tanggal 8 Mei 2025.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : APRIL

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.99	76.56	100.00	100.00	100.00	24.92	75.34	100%	0.00	75.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.80	15.31	10.00	10.00	10.00	6.23				
			Nilai Aspek	96.00		94.14				24.92				

Gambar 15. Capaian Sementara Nilai IKPA Ditjen PDSPKP

- Data capaian output periode April 2025 per tanggal 7 Mei 2025 sebesar 24,92% dari target capaian sebesar 100%. Hasil monitoring capaian ouput terdapat dari 36 Satker di lingkungan PDSPKP (1 satker susat, 1 satker UPT dan 34 satker Provinsi) terdapat 26 Satker sudah melakukan pengisian capaian output, 10 satker belum melakukan pengisian capaian dan 15 satker harus melakukan perbaikan nilai capaian karena belum maksimal 100%.
- Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat kendala dalam penghitungan dan pengisian capaian output oleh Satker Tugas Pembantuan yang disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan dan penilaian indikator kinerja. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan disampaikan kembali terkait kebijakan yang di tetapkan oleh kementerian keuangan terkait pelaksanaan anggaran dan ketetapan pengisian capaian indikator kinerja pelaksana anggaran tahun 2025.
- Output pelaksanaan kegiatan yaitu, seluruh satker dilingkungan Ditjen PDSKP PDSPKP melakukan pengisian capaian output dengan nilai maksimal 100%, dan nilai capaian IKPA PDSPKP pada periode April 2025 sebesar 95,11.



Gambar 16. Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output

- a. Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA Periode Juni Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, KKP pada tanggal 4 Juni 2025. Adapun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut:
 - Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1444/SJ.2/210/VI/2025 tanggal 2 juni 2025, penetapan target capaian IKPA Tahun 2025 pada semester I sebesar 84,00 dan semester II sebesar 92,00. Target tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Penetapan target pada Rencana Kerja KKP tahun 2025 sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
 - Capaian nilai IKPA KKP Peride April tahun 2025 sebesar 93,62% dengan target capaian IKPA pada semester I sebesar 84,00%. Adapun indikator penghitungan capaian IKPA sebagai berikut:
 1. Capaian Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 100%, dengan indikator capaian atas revisi anggaran sebesar 100% dan capaian indikator Deiavi Halaman III DIPA sebesar 90,70%.
 2. Capaian Aspek Kualitas Pelaksanan Anggaran sebesar 93,86%, dengan indikator capaian atas penyerapan anggaran sebesar

75,43%, belanja kontraktual 100%, penyelesaian tagihan sebesar 100%, pengelolaan UP dan TUP sebesar 100%, capaian output sebesar 99,72%.

3. Dispensasi SPM (Pengurang) sebesar 0,00%.

- Berdasarkan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran S-44/PB.2/2025 Tanggal 5 Februari 2025 tentang Ketentuan Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA serta Pelaporan Target dan Capaian Output Tahun 2025, disampaikan bahwa batas waktu pemutakhiran RPD periode triwulanan setiap 10 hari kerja pertama pada awal triwulan. Batas waktu petukahiran RPD halaman III DIPA untuk triwulan I diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2025, triwulan II sampai dengan 22 April 2025, triwulan III sampai dengan 14 Juli 2025 dan triwulan IV sampai dengan 14 Oktober 2025.
- Untuk memperoleh nilai maksimal 100% pada halaman III DIPA dengan nilai ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5% (lima persen). Ditjen PDSPKP akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran secara berkala pada bulan berjalan dengan melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan penggunaan anggaran belanja.



Gambar 17. Rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA KKP pada Indikator Halaman III DIPA Periode Mei Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 467.570.460,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 523.081.000,- atau setara dengan 89%.

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		81,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 81,5. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada periode Triwulan II guna pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP sekaligus sebagai lanjut dari periode triwulan sebelumnya antara lain:

1. Rapat Pembahasan Pembahasan Revisi Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Revisi Anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Ditjen PDSPKP, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Rapat dilaksanakan di Aplikasi Zoom Meeting dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan setiap unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP serta staf bagian program. Rincian informasi revisi: Mekanisme Revisi: Revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Tata Cara Revisi, Revisi pergeseran anggaran antar akun pada Rincian Output yang sama. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran : Mempercepat pencapaian kinerja kementerian/Lembaga, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, serta optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

2. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025

Dalam rangka koordinasi perencanaan program dan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025. Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program serta dihadiri oleh Koordinator Program unit Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Revisi Relaksasi Anggaran telah selesai dilaksanakan, relaksasi tersebut diperuntukan untuk kebutuhan dasar yaitu Honorarium PJLP, Honorarium PPNPN, Honorarium Tenaga Kontrak, Biaya Air, Biaya Listik, Biaya Telepon dan Biaya Internet senilai Rp7.354.389.000, penetapan hasil revisi tersebut ditandai dengan terbitnya DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 23 April 2025.
- b. Dalam rangka mendukung kegiatan, efektifitas dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ditjen PDSPKP Tahun 2025, direncanakan akan dilakukan revisi anggaran kewenangan KPA. Berdasarkan hal tersebut diharapkan masing-masing Eselon II dapat mengajukan usulan revisi untuk dibahan terlebih dahulu pada rapat.

- c. Rencana Kegiatan 2026-2029 diundur pembahasan dengan MKP. Masing2 eselon II untuk segera menyiapkan ranwal masing-masing. (Jumlah CS yg dibangun, Pabrik es yang dbangun, Sarana pasca panen, Senkul, pasar ikan, Coolbox, dsb)



Gambar 18. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

3. Rapat Pembahasan Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025

Dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program serta dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim program. Pembahasan Belanja Operasional Satker Setditjen PDSPKP dan Satker BBP3KP.

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah untuk pemenuhan Belanja Operasional. Pergeseran anggaran belanja operasional antar Satker sebesar Rp510.000.000 dari Satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan ke Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP untuk memenuhi kebutuhan renovasi ruang kerja Direktorat Jenderal PDSPKP Sebagai ruang kerja pimpinan tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal, ruangan ini harus mencerminkan profesionalisme, kenyamanan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, ruang tersebut juga digunakan untuk menerima tamu penting, baik dari dalam maupun luar

negeri, sehingga diperlukan penyesuaian estetika dan tata ruang yang lebih representative.

4. Rapat Pembahasan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025.

Dalam rangka koordinasi perencanaan program dan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan SBPI 2026 DJPDSPKP hanya memperoleh alokasi anggaran SBPI 2026 untuk sebesar Rp 95,50 Miliar yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 79,01 Miliar dan Operasional Perkantoran sebesar Rp 16,49 Miliar.

Usulan penambahan program/kegiatan menyesuaikan SOTK baru dikarenakan adanya penambahan unit kerja Direktorat Akses dan Promosi ditolak oleh Bappenas dan DJA, sehingga program/kegiatan menjadi satu dengan kegiatan Pemasaran Hasil KP dengan pemuktahiran nomenklatur kegiatan menjadi "Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan". Pembahasan terkait Rancangan Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 sesuai format yang diberikan oleh Tim TA Menteri yang diantaranya memaparkan tentang Strategi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Dalam dan Luar Negeri: Penguatan Data dan Informasi Pasar, Perluasan Akses Pasar dan Promosi serta Activity Plan terkait Pembangunan Modelling Outlet Pemasaran Produk Perikanan.



Gambar 19. Rapat Pembahasan Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025

5. Rapat Rancangan Revisi DJA yang bersumber dari Sentra Kuliner TA 2025 dan Usulan Revisi Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025.

Dalam rangka perencanaan program dan anggaran tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP , dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program serta dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim program. Dalam rangka pemenuhan anggaran aspirasi pimpinan dan anggota komisi IV DPR, menindaklanjuti rekomendasi hasil kunker spesifik komisi IV DPR RI ke provinsi DI Yogyakarta dan Bali dan keluarnya Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025 perihal Persetujuan Penggunaan Dana PNBP Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2027. Direktorat Jenderal PDSPKP akan mengusulkan penggunaan alokasi anggaran pembangunan Sentra Kuliner Ikan di lokasi Kampung Nelayan Modern



Gambar 20. Rapat Rancangan Revisi DJA yang bersumber dari Sentra Kuliner TA 2025 dan Usulan Revisi Kewenangan KPA

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 3,5. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akand ihitung pada akhir tahun 2025.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,5 Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada Triwulan II tahun 2025. Setditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan pembahasan revisi manajemen risiko TA 2025 dan penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 yang diadakan pada tanggal 17 April 2025. Kegiatan dihadiri oleh Inspektorat Jenderal dan perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP serta tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP terkait. Pada pembahasan ini dilakukan update atas realisasi pengendalian pada form pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko serta laporan SPIP triwulan I 2025.

Selain itu dilaksanakan pembahasan Revisi form manajemen risiko dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pada TA 2025 Ditjen PDSPKP telah membuat form Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko sebanyak 15 kegiatan dengan rincian:
 - Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
 - Promosi produk rumput Laut Skala Internasional
 - Peralatan Pemasaran
 - Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan (Senkul Banyuwangi dan Pekalongan)
 - Pelaku usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)
 - Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas
 - Sarana Sistem Rantai Dingin
 - Sarana Pengolahan Hasil KP
 - UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha
 - Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/dibina

- Prasarana kawasan hilirisasi kelautan dan perikanan
 - UMKM yang difasilitasi dalam Inkubator Bisnis
 - Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku
 - Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku
 - Pengelolaan BMN
- 2) Terhadap kegiatan tersebut, terdapat perubahan pagu yang disebabkan oleh blokir A tetapi tidak berpengaruh terhadap form manajemen risiko.
- 3) Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat revisi pada form manajemen risiko untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku. Revisi tersebut terkait dengan waktu pelaksanaan pengendalian atas risiko yang mungkin akan terjadi
- b. menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 Juni 2025 yang diikuti oleh tim satuan tugas SPIP Ditjen PDSPKP. Pada sosialisasi ini disampaikan beberapa hal:
- 1) Sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari Biro Keuangan dan BMN dengan 2 (dua) agenda yaitu Proses Manajemen Risiko, Penetapan Selera dan Faktor Risiko serta Penerapan Pengendalian Manajemen Risiko Lingkup Ditjen PDSPKP;
- 2) Tujuan dari sosialisasi ini adalah:
- untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang berbagai jenis risiko yang dihadapi organisasi, baik risiko internal maupun eksternal
 - memberi pemahaman atas kerangka kerja manajemen risiko yang sistematis, mulai dari proses identifikasi, penilaian, mitigasi, hingga pemantauan risiko yang berkelanjutan

- peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi pengendalian yang tepat untuk mengurangi dampak risiko, serta mengambil tindakan pencegahan yang proaktif.
- Salah satu tujuan akhir dari sosialisasi manajemen risiko adalah membentuk budaya organisasi yang sadar akan risiko, di mana setiap individu memahami perannya dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko

3) Latar Belakang Terbitnya KepmenKP 61 Tahun 2024

- MR belum sepenuhnya berperan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan di setiap lini kegiatan
- Manajemen risiko belum terintegrasi secara penuh dalam proses bisnis
- Belum ada perangkat yang lengkap untuk melaksanakan manajemen risiko
- Belum ditentukannya selera risiko dan toleransi risiko dari pimpinan KKP secara berjenjang
- Belum ada kebijakan yang komprehensif yang mengatur Manajemen Risiko
- Identifikasi dan analisis risiko masih lebih banyak pada level operasional dan level strategis
- Belum mengoptimalkan peran UPR masing-masing unit kerja
- Rekomendasi BPKP dalam Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP

4) Penetapan Konteks

Konteks adalah lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Sedangkan Penetapan Konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko.

9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- 1) Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang di update pada aplikasi SIASN BKN dan E-Pegawai KKP;
- 2) Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi MyASN BKN dan E-Pegawai KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional;
- 3) Kinerja dengan bobot 30% berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Kinerja Pegawai BKN pada aplikasi E-Pegawai KKP, dan
- 4) Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi E-Pegawai KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	82	-	75	87	83,12		76,94	83,12	101,37	95,54		8,03

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 83,12. Capaian ini melampaui target Triwulan II Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 82, dengan tingkat realisasi mencapai 101,37% terhadap target triwulanan. Bila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 87, capaian hingga Triwulan II setara dengan 95,54% dari target tahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan II Tahun 2024) sebesar 76,94, maka terdapat peningkatan capaian sebesar 8,03%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam penguatan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP selama semester pertama tahun 2025.

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional APHP dan Pembina Mutu tanggal 16 April 2025;
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan I Tahun 2025 tanggal 23 April 2025;
- c. Sosialisasi Permen KP No. 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja, 10 Juni 2025;
- d. Pemanggilan dan Orientasi Pelaksanaan Tugas CPNS Ditjen PDSPKP Tahun 2024 tanggal 2 Juni s.d 5 Juni 2025;
- e. *Training of Trainer* Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP tanggal 21 Mei 2025;
- f. Pelantikan Jabatan Fungsional Arsiparis tanggal 26 Juni 2025.



Gambar 21. Training of Trainer Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara



Gambar 22. Sosialisasi Permen KP No. 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja, 10 Juni 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.23.355.750,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 77.720.000,- atau setara dengan 40%.

10. **Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, peraturan menteri yang akan disusun Ditjen PDSPKP tahun 2025 meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel 13. Ikhtisar pencasspaian Persentase penyelesaian program
Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian diperoleh dengan membandingkan jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan

jumlah peraturan menteri dan keputusan menteri yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 2103/SJ.4/TU.210/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025, Ditjen PDSPKP belum terdapat realisasi. Hal ini karena target penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan di bulan Agustus, dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan di bulan Juli. Sehingga belum terdapat realisasi penyelesaian.

Sehubungan dengan penyelesaian kedua rancangan peraturan menteri dimaksud, Ditjen PDSPKP telah beberapa kali melakukan rapat pembahasan rancangan peraturan menteri dimaksud, dan setelah disepakati di lingkup Ditjen PDSPKP, Dirjen PDSPKP telah mengirimkan 2 (dua) Nota Dinas ke Sekretaris Jenderal, yaitu:

1. Nota Dinas Nomor 1056/DJPDSPKP/HK.160/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
2. Nota Dinas Nomor 1268/DJPDSPKP/HK.160/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan.

Selain penyusunan peraturan menteri, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan penyusunan peraturan presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Pada triwulan II telah dilakukan beberapa kali

pembahasan baik lingkup internal Ditjen PDSPKP maupun antar eselon I lingkup KKP sebagai berikut:

1. Pembahasan sinkronisasi rencana aksi Gemarikan, tanggal 15 April 2025 berdasarkan undangan Nomor B.3802/DJPDSPKP.1/TU.330/IV/2025.
2. penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Gemarikan, tanggal 28 April 2025 berdasarkan undangan Nomor B.4137/DJPDSPKP.1/TU.330/IV/2025.
3. Bersinergi dengan Biro Hukum dalam melaksanakan Rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian berdasarkan undangan Nomor B.347/SJ.4/TU.330/V/2025.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp441.209.000,-. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp175.069.736,- setara dengan 40 %.

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Penilai Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025. Tahun 2025 target nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 80.

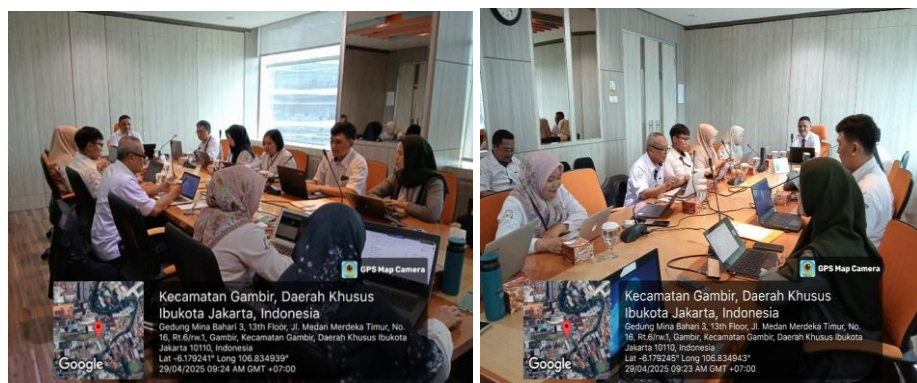
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Triwulan II antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pengawasan Kearsipan di Ruang Rapat Akses Pasar tanggal 29 April 2025.



Gambar 23. Sosialisasi dan Workshop Instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Pengawasan Kearsipan

2. Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 pada tanggal 19 Mei 2025 di Ruang Rapat Akses Pasar, GMB III, Lt.15.

3. Finalisasi Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 pada tanggal 2 Juni 2025 RR. Branding It.15



Gambar 24. Finalisasi Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

4. Pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan Aksi Perubahan Digitalisasi Arsip pada tanggal 23 Juni 2025, , Ruang Rapat Branding GMB III It 15.



Gambar 25. Rapat Persiapan Aksi Perubahan Digitalisasi Arsip

5. Pelaksanaan Penataan Arsip Inaktif pada tanggal 24-25 Juni 2025 di RR. Record Center Raiser Ikan Hias Cibinong.



Gambar 26. Penataan Arsip Inaktif

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 240.909.000,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 202.464.718,- atau setara dengan 84,04%.

12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2025	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2025	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 76. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka persiapan penilaian IKU triwulan 2 tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SiRUP;
- b. Pelaksanaan rapat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui E-Katalog Versi 6 dalam rangka Persiapan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan penggunaan E-Katalog Versi 6 mendukung pengadaan barang dan jasa pada Pembangunan KNMP;
- c. Pelaksanaan rapat Persiapan Sounding Market Pengadaan Sarana melalui E-Katalog Versi 6 dalam rangka Persiapan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada hari Rabu, 25 Juni 2025. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan Sounding Market Pengadaan Sarana melalui Ekatalog Versi 6 mendukung pengadaan barang dan jasa pada Pembangunan KNMP;
- d. Pelaksanaan Sosialisasi Kebutuhan Sarana PDS dalam Mendukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) secara hybrid via Luring di RR. Branding, GMB 3- Lt 15 dan Daring melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 2 Juli 2025. Tujuan Rapat adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan teknis terkait kebutuhan sarana PDS dalam mendukung KNMP kepada calon penyedia potensial.
- e. Pelaksanaan rapat revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal PDSPKP

Triwulan 2 Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan Updating Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SiRUP;



Gambar 27. Rapat Updating RUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP

13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0; Probis Level 1; Probis Level 2; Probis Level 3. SProbis Level 0 dan Level 1 telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-

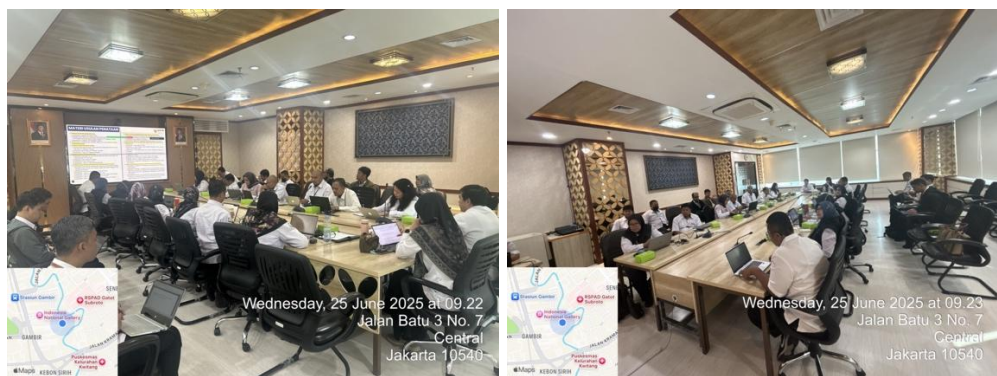
Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 65. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum sapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pembahasan Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Direktorat Pemasaran pada tanggal 9 April 2025;
- b. Pembahasan Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 Direktorat Pengolahan pada tanggal 10 April 2025;
- c. Penyusunan Proses Bisnis Level 2 dan 3 Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 11 April 2025;
- d. Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Pemasaran dan Direktorat Akses dan Promosi pada tanggal 15 Mei 2025;
- e. Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Prasarana dan Sarana pada tanggal 14 Mei 2025;
- f. Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Pengolahan pada tanggal 22 Mei 2025;
- g. Penyusunan perubahan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 16 dan 25 Juni 2025;
- h. Mengikuti Rapat Finalisasi Bisnis Proses Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 25 April 2025;
- i. Mengikut rapat finalisasi bisnis proses Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 28 April 2025;
- j. Mengikuti rapat penyusunan proses bisnis Direktorat Prasarana dan Sarana pada tanggal 28 April 2025;
- k. Mengikuti Rapat Penguatan tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Strategis dengan Eselon 1 Lingkup KKP pada tanggal 8 Mei 2025.



Gambar 28. Penyusunan Proses Bisnis Direktorat Pengolahan



Gambar 29. Penyusunan Perubahan Tugas dan Fungsi BBP3KP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp41.802.000,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp36.850.000,- atau setara dengan 88%.

14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu

pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran, Kriteria inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan, dan berkelanjutan. Klasifikasi inovasi mencakup: Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Untuk semua pelayanan yang dilakukan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Ditjen PDSPKP masuk ke dalam kelompok umum. Tema KIPP 2025 yaitu Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

PENILAIAN PROPOSAL (45%)				
No.	Aspek	Bobot	Sub-Aspek	Bobot
1	Kebaruan	14%	Latar Belakang	19%
			Tujuan	23%
			Cara Implementasi	30%
			Kebaruan Gagasan	28%
2	Efektifitas dan Manfaat	52%	Mekanisme Monev	31%
			Dampak Inovasi	69%
3	Adaptabilitas	17%	Difusi dan Replikasi Inovasi	100%
4	Keberlanjutan	17%	Sumber Daya	42%
			Strategi Keberlanjutan	58%

PENILAIAN OLEH TPI (40%)				
No.	Aspek	Bobot	Sub-Aspek	Bobot
1	Fisibilitas Nasional	100%	Berdayaguna	43%
			Kompleksitas	25%
			Kompatibilitas	21%
			Kolaboratif	11%

PENILAIAN OLEH MASYARAKAT (15%)				
No.	Aspek	Bobot	Sub-Aspek	Bobot
1	Pengetahuan Masyarakat tentang Inovasi	50%	Mengetahui inovasi	25%
			Memahami konsep dan tujuan inovasi	25%
2	Dampak dan Manfaat Inovasi	50%	Merasakan dampak dan manfaat	25%
			Sejauhmana dampak dirasakan	25%

Gambar 30. Aspek dan bobot penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2025

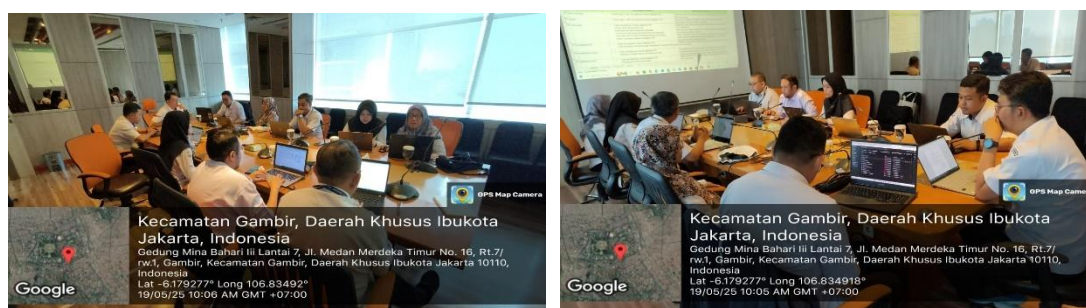
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-

Target Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 adalah 77. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pembahasan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan beberapa kali pada tanggal 24 April 2025, 30 April 2025, dan 6-8 Mei 2025.
- b. Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.
- c. Rapat Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025.



Gambar 31. Rapat Pleno Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 Tanggal 19 Mei 2025

Tercapainya target Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP antara lain disebabkan oleh :

- a. Penyusunan proposal inovasi dan penyediaan data dukung yang telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- b. Tim penyusun proposal inovasi yang menguasai substansi dan memahami cara penulisan yang baik serta memiliki kemauan dan kesanggupan untuk menyelesaikan proposal beserta data dukungnya sesuai waktu yang ditetapkan;

- c. Dukungan dari pimpinan, tim penilai lingkup Ditjen PDSPKP, dan tim penilai lingkup KKP, serta pengguna layanan dan pihak lain yang memberi motivasi, panduan, dan membantu kelancaran penyusunan proposal inovasi;
- d. Adanya dukungan sumber daya regulasi, sarana dan prasarana, serta anggaran yg mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan proposal inovasi.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp51.785.851,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp83.206.000,- atau setara dengan 62%.

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya. Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- a. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
- b. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- c. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 90. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP antara lain:

- Persiapan Valnas Bidang PDSPKP Semester II Tahun 2024 pada tanggal 10 April 2025;
- Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024 pada tanggal 15-17 April 2025;
- Pembahasan Analisa Data Distribusi Hasil Perikanan pada 15 Mei 2025;
- Pembahasan Data Perdagangan Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 20 Mei 2025;
- Rapat Persiapan Workshop Satu Data bidang PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 2 Juni 2025;
- Rapat Pembahasan Portaldata Modul Produksi Bidang PDSPKP Tahun 2025 pada tanggal 3 Juni 2025;
- Rapat Pembahasan Pendataan Satu Data Bidang PDSPKP pada tanggal 12 Juni 2025; dan
- Rapat Portaldata Modul Produksi Bidang PDSPKP tanggal 16 Juni 2025.
- Rapat pembahasan data Geospasial bantuan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP tanggal 23 Juni 2025

j. Rapat Pembahasan Data Geospasial Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 23 Juni 2025



Gambar 32. Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 114.787.786,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp 236.017.000,- atau setara dengan 49%.

16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Ruang lingkup layanan dukungan perkantoran adalah lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari: (1) Terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai (2) Operasional dan pemeliharaan kantor.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

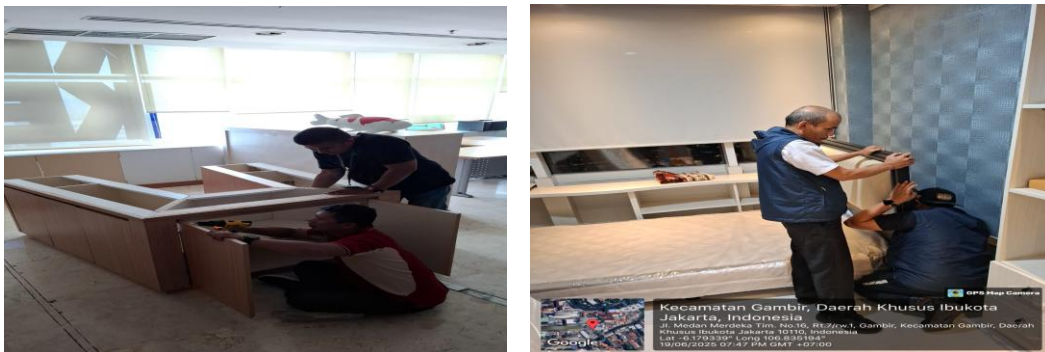
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	6	3	3	12	6	3	3	6	100	50	100	100

Capaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebanyak 3 layanan. Jumlah ini telah memenuhi 100% dari target Triwulan II Tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 3 layanan, serta mencakup 50% dari target tahunan yang berjumlah 12 layanan. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I

tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024 yang juga sebesar 3 layanan, maka tidak terdapat pertumbuhan capaian karena realisasi tetap konsisten pada angka yang sama. Namun demikian terdapat perbedaan satuan yang digunakan, yaitu tahun 2024 menggunakan satuan bulan, sedangkan tahun 2025 menggunakan satuan layanan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis perbandingan antar tahun.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini di Triwulan II antara lain:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Satker Pusat;
2. Layanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan;
3. Pembayaran gaji PPNPN Satker Pusat;
4. Pembayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satker Pusat;
5. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Pusat diantaranya:
 - melakukan pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2;
 - melakukan pemeliharaan alat pengolah data berupa laptop, printer, infocus
 - melakukan pemeliharaan barang elektronik berupa Ac Cassete, AC Split, kulkas, dispenser;
 - melakukan pengadaan barang persediaan berupa ATK, *computer supply* dan bahan cetakan;
 - melakukan pemeliharaan inventaris kantor berupa meja , kursi kerja, kursi rapat, pintu dan lainnya



Gambar 33. Pemeliharaan BMN



Gambar 34. Pengadaan Barang Persediaan

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp33.774.019.993,- sampai dengan Bulan Juni 2025 dari pagu Rp. 67.699.170.000,- atau setara dengan 62%.

17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan khususnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Tabel 20. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025 target persentase penyelesaian permasalahan hukum Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 100%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan maupun dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dan dengan capaian pada periode yang sama.

Pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan II berupa pendampingan Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam memenuhi undangan wawancara dan permintaan dokumen oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, di antaranya:

1. Tanggal 14 April 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 2070 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2025;
2. Tanggal 15 April 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 2071 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 10 April 2025;
3. Tanggal 5 Mei 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 1728 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2025;
4. Tanggal 6 Mei 2025, atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 1729 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 28 April 2025;
5. Tanggal 3 Juni 2025 atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 3210 /IV/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2025;
6. Tanggal 10 Juni 2025 atas Surat Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/ 3441 /VI/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 5 Juni 2025.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 3.172.000,-. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp 102.938.000,- setara dengan 3%.

18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)

Sesuai dengan Permen KP No. 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Terdapat 2 bentuk dokumen kerjasama di KKP yaitu dokumen kerja sama nasional/antar lembaga dan internasional. Ada beberapa jenis kerja sama yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah persentase dokumen kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP. Dokumen yang diterima oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen usulan kerja sama yang dibedakan berdasarkan bentuk dokumen kerja samanya sedangkan Dokumen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen hasil kegiatan implementasi yang dibedakan berdasarkan kerangka kerja samanya.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindak lanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Selama bulan April - Juni 2025, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP;
 - 1) Pembahasan Persiapan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 24 April 2025;
 - 2) Rapat Pembahasan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 29 April 2025;
 - 3) Rapat Pembahasan Usulan Penjajakan Pembentukan *WG on Animal, Fish, and Plant Health Issues* RI-UE tanggal 29 April 2025;
 - 4) Rapat Pembahasan Counterdraft MoU RI-Brunei tanggal 7 Mei 2025;
 - 5) Rapat Evaluasi Kerja Sama BPPSDM KP dengan JICA tanggal 8 Mei 2025;
 - 6) Rapat Pembahasan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 14 Mei 2025;
 - 7) Rapat Pembahasan Counter-draft MoU on Fisheries and Aquaculture Cooperation RI-Hongaria tanggal 22 Mei 2025;
 - 8) Rapat Pembahasan Penyusunan Instrument Hukum Dalam Rangka Protokol Perubahan IJEPA tanggal 21 Mei 2025;

- 9) Rapat Persiapan Pertemuan ke-2 SWG FDA JETCO RI-UK tanggal 27 Mei 2025;
 - 10)Rapat Pembahasan Verifikasi Dokumen SHTI dan Rencana Tindak Lanjut tanggal 28 Mei 2025;
 - 11)Rapat Audiensi Penyelenggaraan Shrimp Summit di Bali tanggal 11 Juni 2025;
 - 12)Rapat Pembahasan Dokumen “Accord” Kemitraan Strategis RI-Inggris tanggal 19 Juni 2025;
 - 13)Rapat Persiapan Monev MSP antara KKP dan SFPF tanggal 19 Juni 2025;
 - 14)Rapat Pembahasan Implementasi Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Jepang Mengenai Kemitraan Ekonomi tanggal 23 Juni 2025;
 - 15)Rapat Dalam Rangka Pertemuan KKP dan Perwakilan Kedubes AS tanggal 24 Juni 2025;
 - 16)Rapat Pembahasan Counterdraft Second Protocol to Amend the MoU on Marine and Fisheries Cooperation RI-Persatuan Emirat Arab tanggal 26 Juni 2025.
- b. Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP;
- 1) Pembahasan rencana implementasi SRG dan rencana perpanjangan kerja sama;
 - 2) Pembahasan rencana implementasi SRG dalam rangkaantisipasi dampak pemberlakuan tarif Impor USA, 8 April 2025;
 - 3) FGD I : "Menguak Peluang Bisnis Olahan Rumput Laut non Hidrokoloid" tanggal 23 April 2025;
 - 4) Rapat Tindak Lanjut Penyusunan PKS BPPMHKP dengan PT. Jatim GRHA Utama (Puspa Argo) tanggal 25 April 2025;
 - 5) data Realisasi kredit UMi dr PT.PNM;
 - 6) *Focus Group Discussion* (FGD) realisasi penyaluran kredit program tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025;
 - 7) Rapat Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara POLRI dan KKP tanggal 5 Mei 2025;

- 8) Training of Training (ToT) identifikasi dan Pendaftaran Indikasi Geografis Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Mei 2025;
- 9) Penandatnganan Perjanjian Kerja Sama antara Asprindo dan GQSP (UNIDO) tentang Peningkatan Produktivitas Budidaya Udang Windu secara Tradisional Plus dan Bandeng daam rangka Mendukung Program Kampung Industri tanggal 22 Mei 2025;
- 10)Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama antara Eselon I KKP dan PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 27 Mei 2025;
- 11)Rapat Dukungan dan Partisipasi pada Indo Fisheries 2025 Expo & Forum 2025 tanggal 10 Juni 2025;
- 12)Rapat Koordinasi Pemantauan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan tanggal 10 Juni 2025;
- 13)Rapat Pembahasan Sinkronisasi Ruang Lingkup PKS dengan BPOM tanggal 12 Juni 2025;
- 14)Rapat Pemantauan Implementasi Kesepakatan Bersama antara KKP dan YKAN tanggal 12 Juni 2025;
- 15)Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama antara KKP dan Pempov Jabar tanggal 12 Juni 2025;
- 16)Penandatngan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan AP2HI pada kick off STELINA yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Shrimp Summit di Bali tanggal 22 Juni 2025
- 17)Pembahasan rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 25 Juni 2025



Gambar 35. Rapat Pembahasan rencana implementasi SRG dalam rangkaantisipasi dampak pemberlakuan tarif Impor USA



Gambar 36. Focus Group Discussion (FGD) realisasi penyaluran kredit program tahun 2025 tanggal 5 Mei 2025



Gambar 37. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Asprindo dan GQSP (UNIDO)



Gambar 38. Penandatanganan PKS antara Ditjen PDSPKP dengan AP2HI pada kick off STELINA



Gambar 39. Rapat rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dan PT. BNI (Persero) Tbk

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp164.454.149,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp315.532.000,- atau setara dengan 44%.

19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Kementerian / Lembaga wajib menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP. Pemberitaan negatif adalah informasi/cerita/keterangan dalam bentuk artikel yang mengandung sentimen negatif. Media massa yang dihitung adalah media cetak dan online yang telah terdaftar pada Dewan Pers Indonesia.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	≤5	≤5	0	0	0	0	120	120	120	120

Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 0%. Dengan hasil ini, capaian terhadap target Triwulan II tahun 2025 mencapai 120%(terhitung otomatis pada Aplikasi

Kinerjaku), yang berarti target berhasil terlampaui secara signifikan. Jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024 yang juga mencatat realisasi sebesar 0%, maka tidak terjadi pertumbuhan karena capaian telah berada pada angka maksimal, yaitu nol pemberitaan negatif.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Membuat siaran pers setiap event Ditjen PDSPKP sehingga media massa tidak ada kesalahpahaman dalam menyusun berita;
- 2) Menjalin media *relationship* yang baik dengan media massa melalui pelayanan informasi dan publikasi yang informatif untuk kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP;
- 3) Menayangkan berbagai konten informasi dan edukasi tentang Ditjen PDSPKP melalui akun resmi media sosial dan website Ditjen PDSPKP;
- 4) Menayangkan berita tentang kegiatan Ditjen PDSPKP secara rutin dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan penyampaian berita baik pada media sosial maupun website Ditjen PDSPKP;
- 5) Memelihara *engagement* dengan *follower* pada media sosial Ditjen PDSPKP dengan tetap memperhatikan materi konten yang tepat;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pertemuan pembahasan kegiatan/event.

Tabel 23. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

Bulan	Sifat/Tendensi Pemberitaan			Total
	Positif	Negatif	Netral	
April	69		16	85
Mei	58		2	60
Juni	39		2	41
Total	166		20	186

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 190.172.352,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp 194.971.000,- atau setara dengan 98%.

20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 (12,5%).
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (25%).
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 (25%)
- Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	S.d TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan 80%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pada tanggal 15 April 2025, diselenggarakan rapat pengelolaan BMN terkait dengan Penyusunan Dokumen Permohonan Persetujuan Sewa Lantai 2 Gedung Perkantoran PIM Muara Baru dan Pembuatan Tiket Permohonan Sewa pada SIMAN V2. Tujuan rapat adalah tersusunya dokumen usulan sewa Lantai 1 s.d 4 Gedung Perkantoran PIM Muara Baru dan penyampaian Tiket Pemohonan Sewa telah tersampaikan kepada KPKNL Jakarta 2 melalui SIMAN V2. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Biro Keuangan dan BMN—Setjen KKP dan Direktorat Pemasaran.
- b. Pada tanggal 08 Mei 2025, Sekretaris Ditjen PDSPKP menyampaikan Surat Nomor B.4654/DJPDSPKP.1/PL.720/V/2025 kepada DJ Seafood dan Surat Nomor B.4653/DJPDSPKP.1/PL.720/V/2025 kepada Direktur Utama CV Solutee Semangat Internasional terkait dengan Penertiban Pemanfaatan BMN PIM Muara Baru. Tujuan surat adalah agar DJ Seafood dan CV Solutee Semangat Internasional untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan kios dan perlengkapannya paling lambat tanggal 11 Mei dan segera melakukan pembayaran atas pemanfaatan area fasilitas umum periode 1 September 2024 s.d. 28 Februari 2025;
- c. Pada tanggal 9 Mei 2025, diselenggarakan rapat Sosialisasi Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP tentang Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas. Tujuan rapat adalah terlaksananya tertib pengelolaan Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas pada setiap Unit Eselon II Direktorat Jenderal PDSPKP. Rapat dihadiri oleh Timja Hukum Setditjen PDSPKP, Timja Dukman dan Operator Aset Tetap setiap unit Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP ;
- d. Pada tanggal 22 Mei 2025, penandatanganan Perjanjian dan BAST Hibah Kendaraan Berpendingin dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada Pemda Kabupaten Kebumen. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib pengelolaan BMN berupa Hibah Kendaraan Berpendingin dan sekaligus penyerahan BMN Kendaraan Berpendingin kepada Pemda Kabupaten Kebumen;

- e. Pada tanggal 22 Mei 2025, Uji Petik Pengelolaan BMN Tahun 2024-2025 Lingkup Ditjen PDSPKP di Pasar Ikan Modern (PIM) dan Cold Storage Muara Baru. Tujuan Uji Petik Pengelolaan BMN adalah untuk melakukan kunjungan lapangan dan sekaligus melakukan pengecekan fisik terhadap BMN yang menjadi objek sampling. dihadiri oleh Inspektur IV - Inspektorat Jenderal KKP beserta dengan Tim Reviu, Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Pemasaran, BBP3KP;
- f. Pada tanggal 12 Juni 2025, Direktorat Jenderal PDSPKP menyampaikan Nota Dinas Nomor 2157/DJPDSPKP.1/PL.720/VI/2025 kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN – Setjen KKP perihal Permohonan Penetapan Pelaksanaan Sewa BMN PIM Muara Baru;
- g. Pada tanggal 18 Juni 2025, rapat terkait terkait tindak lanjut hasil temuan sementara kegiatan pengawasan pengelolaan BMN Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2024-2025 oleh Tim Insektorat IV – Itjen KKP. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pemberdayaan Usaha, BBP3KP;
- h. Pada tanggal 19 Juni 2025, Sekretaris Ditjen PDSPKP menyampaikan Surat Nomor B.5570/DJPDSPKP.1/PL.710/VI/2025 kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok perihal Penggunaan Sementara BMN. Tujuan surat tersebut adalah agar permohonan ditandatangani oleh Pengguna Barang Kementerian Kesehatan dan ditujukan kepada Pengguna Barang Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta menambahkan tujuan dan jangka waktu penggunaan sementara.
- i. Pada tanggal 23 Juni 2025, Direktorat Jenderal PDSPKP menyampaikan Surat Nomor 5663/DJPDSPKP.1/PL.750/VI/2025 kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta perihal Pemintaan Tanggapan Terhadap Hibah Pasar Ikan Higienis (PIH) Penjompongan. Tujuan surat adalah terlaksananya tertib administrasi berupa dokumen resmi dari Pemda DKI Jakarta atas pelaksanaan Hibah PIH Pejompongan yang belum selesai;



Gambar 40. Penandatanganan BAST dan Perjanjian Hibah Kendaraan Berpendingin Dari Direktorat Jenderal PDSPKP kepada Pemda Kabupaten Kebumen

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 94.979.138,- sampai dengan Bulan Maret 2025 dari pagu Rp 135.590.000,- atau setara dengan 98%.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp 89.592.966.000,- (Delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Terdapat Efisiensi sebesar Rp 19.057.041.000,- (Sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) Pagu efektif Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp 70.535.925.000,- (Tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 35.538.619.000,- (Tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) setara dengan 30,87% terhadap pagu awal dan sebesar 39,05% dari pagu anggaran efektif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Triwulan II Tahun 2025 telah menyajikan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang baik dengan ditunjukkan nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,21% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”.

Namun demikian upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rancangan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Ditjen PDSPKP.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan II tahun 2025, seluruh indikator kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan I tahun 2025, seluruh indikator kinerja kegiatan yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAM www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Machmud**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

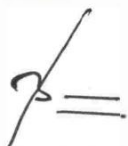
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan   Budi Sulistiyo	Pihak Kesatu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan   Machmud
---	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	81
		4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	76
		5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86
		6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92
		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,5
		8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,5
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	87
		10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	80
		12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	65
		14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	90
		16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5
		20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP (Persen)	80

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
<i>PROGRAM : Dukungan Manajemen</i>	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	127.809.094
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	127.809.094

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Machmud